



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULHAN**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **14132**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/95 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 397.700.000**

1. LAINNYA, PHOENIX SEPEDA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
2. LAINNYA, PHOENIX SEPEDA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 300.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.450.000
6. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.250.000
7. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000



8. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 206.575.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.953.775.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.953.775.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.